



Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Mendukung *e-Government* Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Koming Yuni Sariasih*, Komang Adi Sastra Wijaya

Universitas Udayana

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam mendukung *e-Government* pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. SIMPEG merupakan instrumen digital yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data kepegawaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas kebijakan dari Sutrisno (2007) dan indikator keberhasilan *e-Government* menurut Budi Rianto dkk (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG telah memenuhi lima indikator efektivitas kebijakan, yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu, SIMPEG juga mendukung keberhasilan *e-Government* melalui tersedianya pusat data kepegawaian dan aplikasi pendukung pelayanan birokrasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek keterlibatan publik dan pemanfaatan untuk promosi daerah. Secara keseluruhan, SIMPEG telah memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi digital dalam pengelolaan kepegawaian daerah.

Kata Kunci: SIMPEG, *e-Government*, Efektivitas Kebijakan, Biro Organisasi, Manajemen Kepegawaian

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4173>

*Correspondence: Koming Yuni Sariasih

Email: yunisariasih26@gmail.com

Received: 12-02-2025

Accepted: 23-04-2025

Published: 30-05-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Employee Management Information System (SIMPEG) in supporting *e-Government* at the Organization Bureau of the Regional Secretariat of Bali Province. SIMPEG is a digital tool developed to improve the efficiency, transparency, and accountability of personnel data management. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and document analysis. The analysis is based on Sutrisno's (2007) policy effectiveness theory and Budi Rianto et al.'s (2012) *e-Government* success indicators. The findings reveal that SIMPEG has fulfilled the five indicators of policy effectiveness: program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. Furthermore, SIMPEG supports *e-Government* success through the availability of centralized personnel data and integrated administrative applications. However, challenges remain in terms of public engagement and its utilization for regional promotion. Overall, SIMPEG has made a significant contribution to the digital transformation of regional human resource management.

Keywords: SIMPEG, *e-Government*, Policy Effectiveness, Organization Bureau, Personnel Management

Pendahuluan

Seiring perkembangan jaman yang pesat dewasa ini, tata kelola pemerintahan telah berevolusi ke arah yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Dibantu dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah dapat melakukan transformasi digital untuk meningkatkan segala kebutuhan tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi kebijakan. Transformasi digital dalam konteks pemerintahan tidaknya sebatas digitalisasi proses manual yang sudah ada tetapi juga pengembangan seluruh ekosistem layanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Transformasi digital di Indonesia mulai digalakkan sejak awal dekade 2000-an, yang ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 sebagai tonggak awal pengenalan konsep *e-government* dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang menekankan peran strategis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan publik (B. & Anirwan dalam Isma, 2025). Penerapan *e-Government* diharapkan dapat menjadi optimalisasi akses masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu *e-Government* diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, terciptanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas birokrasi serta mendukung penciptaan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

Pemerintahan yang efektif dan efisien memerlukan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Keberadaan sistem informasi kepegawaian yang efisien akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan kualitas layanan publik. Tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan adanya reformasi birokrasi yang baik. Untuk kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi sebagai wadah untuk mempercepat pelayanan (Wijaya, 2024). Pentingnya pengelolaan data pegawai sebuah organisasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian dapat di upayakan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG menjadi prioritas dalam tahapan pengembangan pemerintahan yang mengutamakan *e-Government* (Muin & Supriaddin, 2024). Dimana SIMPEG menyediakan wadah untuk mengelola, mengolah serta menyajikan data kepegawaian secara sistematis dan terintegrasi. Menurut Nugroho (2008) dalam Waldi, dkk (2024), SIMPEG meningkatkan efektivitas proses pengelolaan data pegawai seperti, proses kenaikan jabatan, perpindahan, dan purnabakti karyawan. Menurut Ahmad dan Luthfi dalam Ardianto (2024), SIMPEG berperan tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai alat strategis yang memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Selain itu, SIMPEG juga menampilkan informasi pegawai secara *real-time* sehingga pegawai dapat langsung mengakses berbagai informasi yang ditampilkan. Perkembangan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peningkatan transformasi digital sistem pemerintahan.

Biro Organisasi yang berada dibawah naungan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam Penerapan dan optimalisasi SIMPEG. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang telah ditetapkan, Kepala Biro Organisasi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan daerah di bidang kelembagaan analisis dan formasi jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta tata laksana dan perpustakaan. Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Biro Organisasi menempati posisi strategis sebagai unit yang mengoordinasikan kebijakan di bidang reformasi birokrasi. Kepala Biro Organisasi memiliki rincian tugas yang mencakup penyusunan program kerja, penetapan perjanjian kinerja, pemberian arahan dan koordinasi, serta perumusan kebijakan daerah dalam aspek-aspek terkait manajemen kepegawaian (<https://biroorg.baliprov.go.id/tupoksi/>). Posisi strategis ini menempatkan Biro Organisasi sebagai motor penggerak transformasi digital dalam tata kelola ASN di Provinsi Bali. Pada era digital, penerapan e-Government menjadi strategi penting untuk merespons kebutuhan masyarakat yang kian beragam dan terus berkembang (Sakawati & Yamin, 2024). Implementasi e-Government tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi. Biro Organisasi sebagai motor penggerak melakukan perubahan budaya kerja ke arah digitalisasi proses administrasi melalui sistem berbasis TIK termasuk implementasi SIMPEG.

Penerapan SIMPEG di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan modernisasi manajemen kepegawaian yang selaras dengan semangat transformasi digital pemerintahan. Biro Organisasi sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap penataan organisasi dan kepegawaian memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerapan SIMPEG. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan sistem digital, baik di tingkat instansi pusat maupun pemerintah daerah, untuk menjamin bahwa implementasi SPBE termasuk di dalamnya SIMPEG berjalan selaras dengan arah transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan keselarasan SPBE, proses pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara terpadu, sehingga membentuk kesatuan pemerintahan yang komprehensif dan menyeluruh, sert menghasilkan birokrasi dan pelayanan public yang memiliki kinerja unggul (Muka, dkk, 2020).

Di tingkat pemerintah daerah, komitmen Pemerintah Provinsi Bali terhadap digitalisasi sistem pemerintahan juga diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. Regulasi ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga bertujuan untuk membangun ekosistem kolaboratif antar Perangkat Daerah. Melalui sistem informasi dan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi, peraturan ini mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat, serta seluruh pemangku kepentingan

terkait. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Rahmawati & Tjenreng (2025), pemerintahan yang mengadopsi prinsip *good governance* diharapkan dapat menyelenggarakan layanan publik dengan cara yang lebih profesional, terbuka, dan terbebas dari praktik korupsi.



Gambar 1. Beranda website SIMPEG

Meskipun penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemerintahan, berbagai tantangan masih perlu dihadapi dan diatasi untuk mencapai optimalisasi sistem secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama yang cukup kompleks adalah memastikan terwujudnya interoperabilitas antara SIMPEG dengan berbagai aplikasi kepegawaian lainnya. Menurut Ramli (2022), Interoperabilitas merupakan bentuk koordinasi dan kerja sama antar sistem layanan elektronik di lingkungan pemerintahan untuk memungkinkan pertukaran informasi, data, atau layanan dalam kerangka SPBE. Istilah ini juga merujuk pada kemampuan suatu sistem teknologi untuk saling berbagi dan memanfaatkan informasi antar sistem secara lintas waktu dan lokasi tanpa batasan. Interoperabilitas ini sangat penting guna menjamin konsistensi, akurasi, dan sinkronisasi data lintas sistem, sehingga seluruh proses manajemen ASN dapat berjalan lebih efisien dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang terintegrasi.

Tantangan besar lainnya adalah terkait dengan keamanan data kepegawaian di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman siber. Ancaman terhadap informasi dan data milik pemerintah kini semakin beragam dan kompleks, sehingga penerapan sistem keamanan siber yang andal serta penguatan regulasi perlindungan data menjadi hal yang sangat krusial (Murtadho, 2024). SIMPEG memuat data pribadi dan informasi sensitif mengenai status kepegawaian, riwayat kerja, serta informasi administratif lainnya yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, penguatan aspek keamanan siber menjadi sangat krusial. SIMPEG perlu dilengkapi dengan sistem proteksi data yang andal dan berlapis, termasuk penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berjenjang, serta sistem pemantauan keamanan secara *real-time* guna mencegah akses ilegal, kebocoran data, maupun potensi serangan siber yang dapat merugikan institusi. Di sisi lain, pengembangan SIMPEG juga membuka berbagai peluang strategis yang menjanjikan bagi peningkatan kualitas manajemen ASN di

Provinsi Bali. Salah satu peluang besar adalah potensi integrasi SIMPEG dengan sistem-sistem pendukung lainnya seperti sistem informasi kinerja, sistem absensi digital, serta sistem penggajian dan tunjangan. Dengan adanya integrasi tersebut, dapat tercipta sebuah ekosistem digital kepegawaian yang komprehensif, efisien, dan mampu mempercepat proses layanan administrasi kepegawaian.

Metodologi

Penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam Mendukung *E-Government* pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana penerapan SIMPEG di Biro Organisasi Sekretariat Daerah, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pengembangan *e-Government*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dengan pengelola dan admin SIMPEG serta pegawai yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian sistem tersebut. Selain itu, dilakukan observasi terhadap proses kerja SIMPEG di lapangan guna memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi sistem. Pengumpulan data juga diperkuat dengan studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi, pedoman teknis, laporan kegiatan, dan dokumen kebijakan yang relevan, sehingga dapat memberikan landasan analitis yang kuat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Setelah melakukan wawancara, observasi di lapangan dan studi dokumentasi, penulis melakukan analisis data yang sistematis untuk menghasilkan hasil yang valid. Teknik analisis data yang dilakukan pertama kali setelah pengumpulan data berhasil dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data. Hasil wawancara, observasi dan dokumen yang dikumpulkan akan dipilih dan disederhanakan dengan menyesuaikan pada fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data ke dalam bentuk deskriptif untuk memundahkan proses pemahaman dan penarikan Kesimpulan. Terakhir dilakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dalam data. Dalam proses ini, melakukan perbandingan temuan di lapangan dengan indikator teori efektivitas kebijakan dan indikator keberhasilan *e-Government*. Hal ini dilakukan untuk memastikan data dan temuan yang diperoleh dapat bersifat konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari implementasi *e-Government*. Sistem ini memungkinkan pengelolaan pegawai di instansi pemerintah dilakukan dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan transparan (Erlangga, dkk 2024). Tujuan dari SIMPEG adalah untuk menyediakan data kepegawaian yang lengkap, tepat, dan cepat guna mendukung efektivitas dalam tata kelola pemerintahan, memperbaiki pengolahan data, serta mewujudkan pelayanan kepegawaian yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Salsabillah & Mursyidah, 2022). Pengembangan SIMPEG dilakukan dengan kolaborasi antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai *leading sector*, Biro Organisasi sebagai aspek penataan jabatan dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) sebagai pengembang teknis aplikasi (Lakip 2020, Diskominfo, 2021).

Berdasarkan Laporan Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2024, Biro Organisasi memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kerja Sama Daerah. Fokus utamanya adalah menyusun strategi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan, sekaligus mendorong perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat Bali. Biro Organisasi secara khusus memiliki peran untuk mengatur aspek kelembagaan, penataan jabatan dan struktur organisasi. Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali nomor B.24.000.4.8.1/2465/IAI/D.KOMINFOS menyebutkan bahwa setelah pelaksanaan rapat antar tiga perangkat daerah, disepakati bahwa Tim Biro Organisasi Setda Provinsi Bali akan bertindak sebagai administrator fitur Peta Jabatan pada aplikasi SIMPEG. Tugas dari admin peta jabatan adalah sebagai fasilitator pembuatan dan pengelolaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kolaborasi antar ketiga unit kerja ini menjadi fondasi utama dalam keberhasilan implementasi SIMPEG untuk mendukung *e-Government* di Provinsi Bali. SIMPEG sendiri telah terintegrasi dengan sistem-sistem lain seperti aplikasi absensi, aplikasi kantor virtual, SIASN, dan sistem informasi talenta (SIMATA). Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan real-time antar aplikasi, sehingga mempermudah proses administrasi kepegawaian, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat akurasi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Kehadiran integrasi lintas aplikasi ini juga menunjukkan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara menyeluruh.



Gambar 2. Integrasi SIMPEG dengan Sistem Lain

Inisiatif penerapan SIMPEG telah menghasilkan pencapaian yang menakjubkan bagi Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerima penghargaan *Digital Government Award SPBE Summit 2024* dalam kategori Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik untuk Kategori Provinsi (baliprov.go.id, 2024). Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Admin Peta Jabatan SIMPEG di Biro Organisasi untuk mengetahui penerapan SIMPEG di Biro Organisasi. Untuk mengukur penerapan SIMPEG di Biro Organisasi, penulis menggunakan teori efektivitas kebijakan yang diukur dengan menggunakan lima indikator yang telah dikemukakan oleh Sutrisno yaitu: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata (Maulida, dkk, 2023).

1. Pemahaman Program

Pemahaman merupakan kemampuan individu untuk mengerti makna dari informasi yang diterimanya (Ismail, dkk, 2024). Dalam hal ini, pemahaman program adalah kemampuan pegawai dapat memahami fungsi, tujuan, dan manfaat SIMPEG dalam mendukung reformasi birokrasi. Pemahaman yang baik akan memudahkan pelaksanaan dan penerimaan sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman program SIMPEG di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah cukup baik. SIMPEG dipahami sebagai suatu kesatuan yang dapat menghasilkan berbagai informasi kepegawaian yang diperlukan seperti informasi biodata pegawai, daftar urut kepangkatan, kenaikan jabatan, pensiun, informasi pegawai yang sedang menduduki jabatan, dan pencetakan SK. Dari hasil wawancara diketahui bahwa aparatur yang terlibat memahami secara menyeluruh peran dan fungsi SIMPEG. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi program SIMPEG di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Tepat Sasaran

Sasaran mengacu pada hasil akhir yang diinginkan, yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ismail, dkk, 2024). Pada indikator ini, melakukan penilaian terhadap penerapan SIMPEG apakah sudah sesuai dengan target pengguna dan kebutuhan organisasi, serta apakah sistem ini menjawab permasalahan yang ada dalam pengelolaan kepegawaian dan birokrasi.

Implementasi SIMPEG di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah menunjukkan ketepatan sasaran yang signifikan. Sistem ini berhasil menargetkan kebutuhan utama dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dengan fokus pada efisiensi proses administrasi, akurasi data kepegawaian, kemudahan akses dan transparansi, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. SIMPEG juga memberikan peran terbatas dan spesifik kepada masing-masing pemangku kepentingan melalui mekanisme *role-based access*, yang menjamin keamanan dan akurasi data. Ini mencerminkan efektivitas dalam hal segmentasi pengguna sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

3. Tepat Waktu

Ketepatan waktu merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (Ismail, dkk, 2024). Dimana dalam penelitian ini, mengukur ketepatan waktu pelaksanaan dan penggunaan SIMPEG dalam proses administrasi kepegawaian, sehingga mendukung percepatan reformasi birokrasi tanpa penundaan yang tidak perlu.

SIMPEG mulai dikembangkan sejak 2015, tetapi implementasi secara menyeluruh dan komprehensif baru tercapai pada tahun 2021. Hal ini dapat dipahami mengingat proses pengembangan sistem digital membutuhkan waktu yang panjang, terlebih dalam birokrasi yang kompleks. Proses pengimputan data yang terkomputerisasi memungkinkan penyelesaian akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual yang lebih lama dan kurang akurat. Kecepatan akses informasi ini sangat mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dalam pengelolaan kepegawaian. Meskipun terdapat kendala teknis dalam pengimputan data atau keterlambatan akibat proses administrasi manual yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, penanganan terhadap gangguan sistem dilaporkan berlangsung secara cepat dan responsif oleh tim pengembang (Diskominfos).

4. Tercapainya Tujuan

Indikator tercapainya tujuan menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berhasil mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Ismail, dkk, 2024). Dalam penelitian ini menilai sejauh mana SIMPEG berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian yang mendukung reformasi birokrasi.

Tujuan utama SIMPEG untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data pegawai yang terintegrasi telah tercapai dengan baik. Sistem ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh data kepegawaian dalam satu platform yang dapat diakses oleh unit-unit yang membutuhkan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan SIMPEG juga tercermin dari pengakuan yang diterima Pemerintah Provinsi Bali melalui penghargaan *Digital Government Award SPBE Summit 2024*. Penghargaan ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk SIMPEG, telah mencapai standar terbaik tingkat nasional. Tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian juga telah tercapai melalui peningkatan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

5. Perubahan Nyata

Indikator perubahan nyata mengacu pada dampak yang dirasakan oleh pihak eksternal sebagai penerima program. Apabila terjadi peningkatan kondisi, maka program tersebut dapat dianggap berhasil (Ismail, dkk, 2024). Dalam hal ini dilakukan pengukuran dampak nyata yang dihasilkan oleh penggunaan SIMPEG, misalnya perubahan dalam proses kerja, peningkatan kualitas layanan kepegawaian, dan perbaikan birokrasi yang dapat dirasakan oleh pegawai dan organisasi.

Perubahan paling mencolok adalah transisi dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi yang memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan administrasi pegawai. Pemeliharaan informasi pegawai menjadi relatif mudah dan sederhana, serta dapat mengukur kinerja pegawai secara lebih objektif. Perubahan nyata lainnya adalah peningkatan kemampuan organisasi dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan terkini. SIMPEG telah memungkinkan pimpinan untuk mengakses informasi kepegawaian secara *real-time*, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat dan berbasis data.

Upaya dukungan *e-Government* Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Menurut Budi Rianto dkk dalam Lestari & Fajri (2022), *e-Government* adalah bentuk penerapan pelaksanaan tugas serta tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat empat indikator keberhasilan *E-Government* yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi kontribusi SIMPEG dalam mendukung *E-Government*:

1. Ketersediaan Data dan Informasi pada Pusat Data

Implementasi SIMPEG di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menciptakan pusat data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Pusat data ini menyimpan berbagai informasi kepegawaian termasuk biodata pegawai, daftar urut kepangkatan, informasi kenaikan pangkat, data pensiun, dan informasi pegawai yang sedang menduduki jabatan tertentu. Ketersediaan data pada pusat data SIMPEG juga didukung oleh sistem penyimpanan yang aman dan terjamin melalui otentikasi pengguna dan pembatasan akses berdasarkan tingkat kewenangan. Hal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang seperti admin peta jabatan yang dapat mengakses informasi kepegawaian, sekaligus menjaga keamanan dan integritas data. Pusat data SIMPEG juga memungkinkan akses informasi yang dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, mendukung efisiensi operasional administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Ketersediaan Data dan Informasi bagi Kebutuhan Promosi Daerah

Saat ini SIMPEG belum secara spesifik digunakan untuk mendukung kebutuhan promosi daerah, namun potensi penggunaannya sudah mulai terlihat dengan adanya permintaan dari kabupaten lain (seperti Kabupaten Buleleng) untuk mengadaptasi sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa SIMPEG memiliki kualitas sistem yang dapat direplikasi dan menjadi aset digital strategis daerah. Selain itu, Provinsi Bali telah berhasil meraih penghargaan *Digital Government Award SPBE Summit 2024* yang menunjukkan bahwa data dan informasi dari sistem seperti SIMPEG telah berhasil mempromosikan kemampuan daerah dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Data kinerja dan pencapaian dalam pengelolaan kepegawaian melalui SIMPEG menjadi bagian dari portofolio digital yang mendukung reputasi Provinsi Bali sebagai daerah yang inovatif dalam penerapan teknologi informasi di sektor pemerintahan.

3. Ketersediaan Aplikasi *E-Government* Pendukung Pekerjaan Kantor dan Pelayanan Publik

SIMPEG telah terbukti sebagai aplikasi *e-Government* yang efektif dalam mendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publik di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai dokumen kepegawaian secara otomatis, termasuk pencetakan SK dan dokumen administratif lainnya yang diperlukan dalam pelayanan publik. Sistem ini juga memungkinkan pemrosesan berbagai layanan kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pegawai serta masyarakat yang membutuhkan layanan.

4. Ketersediaan Aplikasi Dialog Publik

Indikator ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dari hasil wawancara, fitur dialog publik seperti pengaduan atau umpan balik masyarakat belum terintegrasi secara efektif dalam SIMPEG. Jika terdapat masalah pada sistem, koordinasi akan dilakukan langsung oleh pegawai melalui aplikasi diluar SIMPEG seperti *WhatsApp*, sehingga belum mencerminkan keterbukaan *e-Government* secara utuh. Selain itu, tidak ada nya peraturan maupun laporan yang khusus membahas mengenai SIMPEG juga menurunkan kredibilitas aspek *e-Government* pada pelaksanaanya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali telah berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola kepegawaian serta mendukung implementasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini tercermin dari pemahaman aparatur yang komprehensif terhadap peran dan fungsi SIMPEG, ketepatan sasaran sistem dalam memenuhi kebutuhan utama administrasi kepegawaian, serta kecepatan dan responsivitas dalam pengelolaan data kepegawaian. Selain itu, tujuan utama SIMPEG untuk menciptakan efisiensi, integritas, dan akurasi data kepegawaian telah tercapai, yang ditandai dengan integrasi data kepegawaian dalam satu platform dan penghargaan *Digital Government Award SPBE Summit 2024* yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali. Perubahan nyata juga terlihat melalui transisi dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi yang meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan indikator keberhasilan *e-Government* SIMPEG telah berhasil menciptakan pusat data kepegawaian yang terintegrasi dan aman, serta mendukung efisiensi operasional administrasi. Namun demikian, dalam hal keterlibatan publik atau aplikasi dialog publik, SIMPEG masih belum memenuhi indikator yang optimal. Komunikasi pengguna masih dilakukan secara informal melalui aplikasi *WhatsApp* dan belum difasilitasi dalam bentuk kanal resmi dalam sistem. Selain itu, SIMPEG belum secara spesifik digunakan untuk mendukung kebutuhan promosi daerah. Saat ini penggunaan SIMPEG hanya difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan dalam bidang manajemen kepegawaian. Oleh karena itu, meskipun SIMPEG telah berhasil memberikan

kontribusi besar dalam mendukung *e-Government* dan reformasi birokrasi, perlu adanya penguatan pada kebutuhan promosi daerah, aspek partisipasi publik dan integrasi dengan sistem komunikasi dua arah agar penerapan *e-Government* dapat berjalan secara lebih holistik.

Referensi

- Ardianto, Deni. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (Skripsi Sarjana, Universitas Winaya Mukti). https://repo.unwim.ac.id/83/1/Deni%20Ardianto_SKRIPSI%20PENGARUH%20SISTEM%20INFORMASI%20MANAJEMEN%20KEPEGAWAIAN%20TERHADAP%20KUALITAS%20PELAYANAN%20ADMINISTRASI%20KEPEGAWAIAN%20DI%20BPBD%20PROV.%20JABAR.pdf
- Baliprov.go.id. (2024). Pemprov Bali Raih Penghargaan Penerapan SPBE Terbaik pada Digital Government Award SPBE Summit 2024. Diakses pada 28 Mei 2025 melalui <https://www.baliprov.go.id/web/pemprov-bali-raih-penghargaan-penerapan-spbe-terbaik-pada-digital-government-award-spbe-summit-2024/>
- Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah “Biro Organisasi Setda Provinsi Bali” Tahun 2024. https://www.baliprov.go.id/web/wp-content/uploads/2025/04/LKJIP_2024_BIRO_ORGANISASI-2.pdf
- Biroorg.baliprov.go.id. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Biro Organisasi Setda Prov. Bali. Diakses pada 20 Mei 2025 melalui <https://biroorg.baliprov.go.id/tupoksi/>
- Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar. (2021). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Tahun 2020. https://www.kominfo statistik.denpasarkota.go.id/public/uploads/transparansi/transparansi_keuangan_212302020235_LAKIPDinasKominfoth2020.pdf
- Erlangga, O., Hisham, M. F., Yunis, F. F., Hidayat, R. P., & Hanoselina, Y. (2024). Efektivitas Pengelolaan Data Pegawai Berbasis Website Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 2(4), 313-322.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

- Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, M., Fadhillah, S. K., KN, J., Akmal, F., & Chairunnisak, S. (2025). Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 6(2), 66-77.
- Ismail, A., Anggoro, M. Y. A. R., & Daweng, M. (2024). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) DINAS PENDIDIKAN. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(4), 1031-1038.
- Lestari, I. P., & Fajri, L. M. N. (2022). Analisis E-Government Dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 8(02), 10-23.
- Maulida, W., Rudiana, R., & Sutisna, J. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 3(1), 117-129.
- Muin, M. S., Muthalib, A. A., & Supriaddin, N. (2024). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk Mendukung *e-Government* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 437-452.
- Muka, I. W., Widyatmika, M. A., & Putra, I. K. G. D. (2020). Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 253-276.
- Murtadho, M. A. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Era Digital di Indonesia. *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 12-23.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). *E-Government* Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan *E-Government* di Indonesia (*E-Government* Readiness: Main Actor Readiness Assessment for *E-Government* Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 22(1), 1-17.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77-90.

Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313-323.

Ramli, M. F. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). ANALISIS PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 4(1), 49-61.

Salsabillah, N. M. H., & Mursyidah, L. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 3(2), 15-15.

Supintar, D. B., & Ekowati, M. (2025). EFEKTIVITAS MANAJEMEN PNS MELALUI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN (Doctoral dissertation, IPDN).

Waldi, S., Andini, P., Ilahi, R., & Hanoselina, Y. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di Sektor Publik. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4), 61-72.

Wijaya, K. A. S. (2024). Mobile Paspur Sebagai Salah Satu Strategi Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(2), 82-92.